

Kehormatan sebagai Motif: Narasi Yudisial dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Kehormatan *Qandeel Baloch*

Zul Khaidir Kadir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 25-06-2026
Disetujui 03-06-2026
Diterbitkan 05-06-2026

ABSTRACT

The murder of Qandeel Baloch is often discussed as a symbol of honor-based violence in Pakistan, yet limited attention has been given to how courts formulate and evaluate honor as motive within criminal proof. This article aims to examine how honor operates in judicial narrative, criminal liability, and evidentiary sufficiency in the Qandeel Baloch case. It adopts a normative-doctrinal legal method through textual analysis of the 2019 judgment of the Additional Sessions Judge, Multan, the 2022 appellate ruling of the Lahore High Court, relevant provisions of the Pakistan Penal Code, and the Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honor) Act 2016. The study finds that honor did not function as an autonomous basis of criminal liability. At trial, honor helped the court characterize the killing as intentional and sufficiently serious to warrant punishment despite familial forgiveness. Its legal force, however, weakened once the confession and supporting evidentiary basis were challenged on appeal. The case demonstrates that a socially persuasive honor narrative must remain subject to evidentiary discipline, individualized culpability, and a clear distinction between social context and legal proof.

Keywords: Honor Killing; Judicial Narrative; Qandeel Baloch

ABSTRAK

Pembunuhan Qandeel Baloch sering dibahas sebagai simbol kekerasan berbasis kehormatan di Pakistan, tetapi perhatian terhadap cara pengadilan merumuskan dan menilai motif honor dalam pembuktian pidana masih terbatas. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana motif honor bekerja dalam narasi yudisial, pertanggungjawaban pidana, dan kecukupan pembuktian pada perkara Qandeel Baloch. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal melalui telaah tekstual atas putusan Additional Sessions Judge, Multan, tahun 2019, putusan Lahore High Court tahun 2022, ketentuan Pakistan Penal Code yang relevan, serta Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honor) Act 2016. Hasil penelitian menegaskan bahwa honor tidak berdiri sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yang otonom. Pada tingkat pertama, motif honor membantu pengadilan menilai pembunuhan sebagai tindakan sengaja yang tetap layak dihukum meskipun terdapat pemaafan keluarga. Namun kekuatan hukumnya melemah ketika pengakuan dan dasar pembuktian pendukung digugat pada tingkat banding. Perkara ini memperlihatkan bahwa narasi honor yang kuat secara sosial tetap harus tunduk pada disiplin pembuktian, individualisasi kesalahan, dan pembedaan tegas antara konteks sosial dan bukti hukum.

Katakunci: Narasi Yudisial; Pembunuhan demi Kehormatan; Qandeel Baloch

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kadir, Z. K. (2026). Kehormatan sebagai Motif: Narasi Yudisial dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan Kehormatan Qandeel Baloch. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 5054-5067. <https://doi.org/10.63822/0062cr38>

PENDAHULUAN

Pembunuhan demi kehormatan yang dilekatkan dengan istilah *honor killing* membawa persoalan yang lebih rumit daripada sekadar pencarian motif (Aksoy & Szekeli, 2025). Di satu sisi, istilah *honor* biasa dipakai untuk menerangkan latar sosial dari kekerasan yang dilakukan anggota keluarga terhadap perempuan yang dianggap melanggar batas perilaku yang diterima (Villacampa et al., 2026). Di sisi lain, begitu istilah itu masuk ke ruang peradilan pidana, kedudukannya berubah karena ia tidak lagi berhenti sebagai penjelas sosial, melainkan mulai masuk ke cara hakim mengartikan tindak pidana, menyeleksi fakta, dan merumuskan kadar kesalahan pelaku (Williams et al., 2023). Masalah utamanya terletak pada pertemuan antara tuntutan pertanggungjawaban pidana yang presisi dan narasi kehormatan yang membawa muatan sosial luas, sehingga asumsi yang hidup di luar hukum mudah terbawa ke dalam cara perkara dinilai (Pears & Easteal, 2025).

Perkara Qandeel Baloch membuat persoalan itu tampak dengan sangat jelas (Khoja-Moolji, 2022). Kasus ini menonjol bukan hanya karena korban merupakan figur publik dengan visibilitas tinggi, melainkan juga karena perkara tersebut mempertemukan otonomi perempuan, kontrol keluarga, rasa malu kolektif, dan respons hukum pidana dalam satu rangkaian peristiwa yang saling menekan. Nama Qandeel Baloch cepat berubah dari identitas personal menjadi simbol, tetapi sorotan simbolik seperti itu sering menutupi cara kerja hukum yang sesungguhnya. Yang penting dari perkara ini bukan semata keberatan keluarga terhadap gaya hidup korban, melainkan cara keberatan itu diterjemahkan ke dalam bahasa hukum sebagai motif yang dipakai untuk menjelaskan pembunuhan. Dalam perkara inilah bahasa kehormatan beralih dari ranah moral keluarga ke ranah atribusi hukum yang memengaruhi penilaian pidana (Manzoor et al., 2025).

Istilah kehormatan atau *honor* dikaitkan sebagai label normatif, bukan fakta budaya yang dianggap tetap. Penyebutannya membawa gagasan tentang kepatuhan, reputasi keluarga, kontrol atas tubuh perempuan, dan pemulihan tatanan yang dianggap rusak. Sementara itu, narasi yudisial dipahami sebagai cara lembaga peradilan menyusun fakta ke dalam urutan yang masuk akal secara hukum, sehingga putusan tidak sekadar memindahkan fakta ke dalam bahasa formal, tetapi memilih fakta tertentu, memberi tekanan pada relasi tertentu, lalu menaunkannya dengan niat, alasan tindakan, dan kadar kesalahan (Kadir, 2026b). Pertanggungjawaban pidana kemudian menjadi ukuran utama untuk menilai apakah motif *honor* hanya berfungsi sebagai latar atau justru ikut mengubah cara pengadilan mengartikan unsur mental, individualisasi kesalahan, dan dasar pemidanaan.

Kajian tentang *honor killing* selama ini banyak bergerak di wilayah patriarki, kontrol atas seksualitas perempuan, serta hubungan antara keluarga, komunitas, dan kekerasan (Mappaselleng & Kadir, 2025). Literatur dalam arus ini menegaskan bahwa pembunuhan berbasis kehormatan tidak dapat direduksi menjadi ledakan emosi individual, sebab peristiwa itu tumbuh dari lingkungan normatif yang mengaitkan martabat keluarga dengan perilaku perempuan, terutama di ruang publik, relasi intim, dan representasi tubuh (Shahid et al., 2024). Uraian seperti ini membantu menjelaskan mengapa tindakan ekstrem dapat diterima sebagai pemulihan tatanan, tetapi penjelasan sosiologis saja tidak cukup karena masih ada jarak antara latar sosial tersebut dan cara pengadilan menerjemahkannya ke dalam kategori yang relevan secara pidana.

Kajian hukum pidana memberi pintu masuk yang berbeda. Motif, *mens rea*, dan pertanggungjawaban dibahas dengan ukuran yang lebih ketat, sehingga literatur ini menegaskan bahwa motif tidak selalu menjadi unsur delik yang harus dibuktikan (Palermo, 2022). Hukum pidana bertumpu pada perbuatan, sikap batin yang relevan, dan hubungan pertanggungjawaban antara pelaku dan tindakannya. Namun motif tetap penting karena sering dipakai untuk menafsirkan intensi, kadar kesalahan, dan alasan yang memengaruhi

penjatuhan pidana. Masalahnya, dalam perkara yang dibingkai sebagai *honor killing*, motif tidak hadir dalam ruang yang steril, sebab ia datang bersama beban sosial yang dapat memperluas arti tindakan pelaku, bahkan kadang memberi kesan seolah-olah kekerasan tersebut memiliki logika internal yang dapat dipahami, padahal penjelasan sosial tidak sama dengan pembenaran yuridis.

Kajian tentang narasi yudisial menambah kedalaman pada persoalan tersebut. Fokusnya terletak pada cara putusan tidak hanya mencatat fakta, tetapi merangkai fakta dalam susunan yang membuat satu versi realitas tampak paling layak diterima. Di sana bekerja pilihan diksi, urutan peristiwa, relasi sebab akibat, dan tekanan pada karakter tertentu dari pelaku maupun korban (Dagan & Zimran, 2023). Dalam hukum pidana, cara bercerita seperti ini tidak netral karena dapat mengubah cara kesalahan dan tanggung jawab diartikan. Putusan yang tampak teknis pun tidak sepenuhnya bebas dari bahasa sosial, dan dalam perkara berbasis kehormatan rembesan itu lebih mudah muncul karena pengadilan berhadapan dengan istilah yang sejak awal sudah sarat penilaian moral.

Tiga arus kajian tersebut jarang benar-benar bertemu dalam satu analisis yang rapat. Studi tentang *honor killing* kaya dalam menerangkan struktur sosial yang menopang kekerasan, tetapi sering berhenti sebelum sampai pada cara kerja doktrin di ruang pengadilan (Ge et al., 2024). Sebaliknya, kajian hukum pidana cermat dalam membedakan motif, niat, dan kesalahan, tetapi tidak selalu peka terhadap cara bahasa sosial masuk ke dalam penalaran yudisial (Munro et al., 2021). Perkara Qandeel Baloch memang kerap dirujuk sebagai kasus penting dalam perdebatan tentang kekerasan berbasis kehormatan dan reformasi hukum di Pakistan, tetapi perhatian akademik lebih sering tertuju pada sisi simbolik dan respons normatifnya daripada pada teknik atribusi motif di dalam teks hukum. Belum cukup terang bagaimana *honor* dirumuskan sebagai motif dalam narasi yudisial, bagaimana rumusan itu menata hubungan antara pelaku, korban, dan keluarga, lalu bagaimana konstruksi tersebut memengaruhi pertanggungjawaban pidana.

Perkara Qandeel Baloch dipakai untuk menelaah tiga persoalan yang saling terkait. Pertama, bagaimana motif *honor* dirumuskan di dalam narasi yudisial pada perkara pembunuhan tersebut. Kedua, bagaimana atribusi motif itu masuk ke dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, terutama pada saat pengadilan mengartikan kesengajaan, melekatkan kesalahan pada pelaku, dan menilai alasan negara untuk tetap menghukum meskipun ada pemaafan keluarga. Ketiga, bagaimana batas penggunaan motif *honor* dijaga di dalam pembuktian pidana, sehingga bahasa sosial tentang kehormatan tidak melampaui fungsi hukumnya dan berubah menjadi pengganti alat bukti yang sah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan kajian tentang *honor killing*, narasi yudisial, dan hukum pidana ke dalam satu pembacaan yang lebih rapat. *Honor* tidak diperlakukan semata-mata sebagai latar budaya yang menjelaskan kekerasan, melainkan sebagai motif yang diberi arti hukum di dalam putusan dan karena itu ikut memengaruhi cara perkara disusun, diuji, dan dinilai. Melalui perkara Qandeel Baloch, tulisan ini memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam pembunuhan atas nama kehormatan tidak berhenti pada motif yang diklaim pelaku, tetapi bergerak ke cara pengadilan menerima atau menahan motif tersebut di dalam pertanggungjawaban pidana dan pembuktian. Dengan posisi seperti ini, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pembacaan yang lebih hati-hati terhadap hubungan antara narasi sosial, struktur putusan, dan batas penalaran pidana.

METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum normatif-doktrinal dipakai untuk menelaah putusan pengadilan dan bahan hukum

pidana yang relevan. Fokusnya tidak terletak pada pengukuran gejala sosial *honor killing*, melainkan pada cara motif *honor* dirumuskan, disaring, dan diberi relevansi hukum dalam proses pidana. Korpus utama terdiri atas putusan *Additional Sessions Judge*, Multan, tertanggal 27 September 2019, putusan *Lahore High Court*, Multan Bench, tertanggal 14 Februari 2022, *Pakistan Penal Code*, terutama Pasal 302 dan Pasal 311, serta *Criminal Law (Amendment) (Offences in the Name or Pretext of Honor) Act 2016*. Literatur akademik dipakai secara selektif untuk menjelaskan konteks normatif dan mempertajam posisi analitis, sedangkan laporan media digunakan secara terbatas untuk memverifikasi kronologi dan posisi prosedural perkara.

Analisis dimulai dari fakta perkara, relasi antara korban dan pelaku, pengakuan, motif, dan pertimbangan pembuktian di dalam putusan. Setelah itu dibedakan antara motif yang diklaim, cara penuntut membongkai perkara, dan motif yang akhirnya diterima atau ditolak pengadilan, sehingga alasan yang dikemukakan pelaku tidak otomatis berubah menjadi motif yang tervalidasi secara hukum. Hubungan antara formulasi motif, inferensi atas *intentional killing*, individualisasi *culpability*, dan alasan penghukuman dalam kerangka Pasal 311 PPC kemudian ditelusuri, lalu pada tahap akhir batas probatif motif *honor* diuji untuk melihat apakah motif itu masih bergerak dalam fungsi evidensial yang sah atau justru melampaui kapasitas buktinya. Dengan cara ini, yang diuji bukan sekadar isi putusan, melainkan juga kesesuaiannya dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dan pembuktian yang rasional (Kadir, 2026c).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Narasi yudisial dan atribusi motif *honor* dalam perkara Qandeel Baloch

Qandeel Baloch, yang bernama lahir Fouzia Azeem, dibunuh di rumah keluarganya di Multan pada pertengahan Juli 2016. Tidak lama sesudah itu, Muhammad Waseem, saudara laki-lakinya, masuk ke pusat perkara setelah muncul pengakuan awal yang mengaitkan pembunuhan tersebut dengan aktivitas publik korban di media sosial. Sejak awal, alasan itu cepat memperoleh tempat di ruang publik sehingga pembunuhan ini tidak lagi diperlakukan sebagai perkara pembunuhan biasa, melainkan langsung dilekatkan pada label *honor killing*. Qandeel hadir sebagai figur publik yang visibel dan terus-menerus dibebani penilaian moral, sedangkan Waseem hadir sebagai saudara laki-laki yang mengaku bertindak demi memulihkan kehormatan keluarga. Pada titik itulah perkara ini segera masuk ke dalam kosa kata kehormatan, rasa malu keluarga, dan pengawasan atas perilaku perempuan, sehingga bahasa sosial telah lebih dahulu membentuk cara peristiwa itu dimengerti sebelum proses hukum berjalan penuh (Ram, 2025).

Pada 27 September 2019, *Additional Sessions Judge*, Multan, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Waseem berdasarkan Pasal 311 *Pakistan Penal Code*, dan pidana itu tetap dijatuhkan walaupun ada dinamika pemaafan keluarga. Akan tetapi, pada 14 Februari 2022, *Lahore High Court*, Multan Bench, membatalkan putusan tersebut dan membebaskan Waseem setelah menilai ada cacat serius pada pengakuan serta lemahnya dasar pembuktian yang masih tersisa. Dua putusan itu membuat satu hal menjadi jelas bahwa motif *honor* tidak sebagai fakta hukum yang kokoh dari awal sampai akhir, sebab pada satu tahap ia diberi tempat untuk memberi bentuk pada perkara, sedangkan pada tahap berikutnya kehilangan pijakan ketika pengadilan menilai pembuktiannya tidak cukup.

Perubahan kedudukan itu hanya dapat dilihat dengan jelas bila tiga lapisan dipisahkan sejak awal. Lapisan pertama terletak pada alasan yang dikemukakan pelaku. Lapisan kedua terletak pada cara alasan itu masuk ke dalam konstruksi perkara. Lapisan ketiga terletak pada kedudukannya setelah diuji pengadilan. Pemisahan ini penting karena banyak pembahasan tentang *honor killing* bergerak terlalu cepat dari

pengakuan pelaku menuju anggapan bahwa kehormatan telah menjadi fakta hukum yang utuh, padahal dalam perkara Qandeel Baloch langkah seperti itu justru menyesatkan. Apa yang dikatakan pelaku tentang alasan tindakannya belum dengan sendirinya sama dengan motif yang diterima pengadilan, sehingga ruang di antara keduanya harus diisi terkait dengan penyidikan, penuntutan, susunan fakta, dan akhirnya penilaian pembuktian. Tanpa pembedaan seperti ini, seluruh perkara akan tampak seolah-olah bergerak lurus, padahal justru lapisan-lapisan itulah yang menentukan arti hukumnya.

Dalam pengakuan awal, Waseem mengaitkan pembunuhan dengan visibilitas publik Qandeel yang menurutnya telah mempermalukan keluarga. Pada tingkat ini, *honor* masih berada sebagai alasan tindakan yang diajukan oleh pelaku. Namun dari sudut hukum pidana, alasan seperti itu baru memberi pijakan awal, sehingga belum dapat langsung diubah menjadi dasar yang mapan untuk mengartikan keseluruhan perkara. Banyak pembahasan sosial tentang *honor killing* membuat langkah itu terasa mudah karena masyarakat telah mempunyai kosa kata yang mapan tentang rasa malu keluarga dan kontrol atas tubuh perempuan (Heydari et al., 2021). Akibatnya, pengakuan pelaku kerap tampak seolah-olah telah menjelaskan peristiwa secara lengkap, padahal di dalam proses pidana keadaan seperti itu justru harus ditahan karena alasan tindakan tetap harus melewati saringan prosedural, pembuktian, dan relevansi hukum. Dengan kata lain, pengakuan itu penting, tetapi kedudukannya belum lebih dari bahan awal yang masih harus diuji.

Motif *honor* mulai memperoleh bentuk hukum yang lebih jelas ketika perkara masuk ke tahap pembimbingan oleh penuntut. Pada titik ini, bahasa kehormatan tidak lagi berhenti sebagai pengakuan personal, melainkan mulai memberi arah pada penataan fakta sehingga hubungan keluarga, konteks sosial korban, dan alasan tindakan ditempatkan dalam satu susunan yang saling menguatkan. *Honor* tidak diajukan sebagai unsur delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alasan yang membuat pembunuhan itu tampak lahir dari tata nilai keluarga tertentu. Perubahan ini sangat penting karena begitu motif dipakai untuk merapikan perkara, beberapa fakta memperoleh ruang yang lebih besar daripada fakta lain, sehingga persona publik korban, relasinya dengan keluarga, dan persepsi tentang reputasi keluarga ikut menentukan cara perkara dijelaskan (Awais & Al Gharaibeh, 2026). Dengan demikian, yang bekerja bukan lagi sekadar cerita tentang apa yang dilakukan pelaku, melainkan juga cara perkara itu dipikirkan bentuknya di dalam bahasa hukum.

Posisi Qandeel sebagai figur publik membuat perkara ini juga sangat peka terhadap penataan fakta. Hal ini terlihat saat korban tidak hadir semata-mata sebagai tubuh yang dibunuh, sebab ia datang ke dalam perkara dengan beban sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, persona publik korban tetap dapat relevan sejauh membantu menerangkan mengapa alasan kehormatan diajukan oleh pelaku atau lingkungan keluarga. Namun relevansi itu tidak dapat dibiarkan melebar tanpa batas, sebab ketika persona publik korban berubah menjadi pusat penjelasan yang terlalu besar, perhatian perkara mudah beralih dari tindakan membunuh ke penilaian terhadap korban. Dengan begitu, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya latar sosial, melainkan pada kadar dan tempat latar itu di dalam pertimbangan hukum.

Lalu, putusan tingkat pertama memberi tempat yang cukup jelas pada struktur perkara yang mengaitkan pembunuhan dengan kehormatan keluarga. Hal itu tampak dari keputusan untuk tetap menjatuhkan pidana penjara seumur hidup di bawah Pasal 311 PPC meskipun ada dinamika pemaafan keluarga. Dalam posisi seperti ini, kehormatan tidak diperlakukan sebagai alasan yang melunakkan, melainkan hadir sebagai latar yang membuat negara tetap memandang perkara ini perlu dihukum. Artinya, pada tingkat pertama, motif *honor* tidak dipakai untuk menurunkan bobot kesalahan, melainkan lebih dekat dengan konteks yang menguatkan alasan negara untuk tidak membiarkan perkara berhenti sebagai urusan privat keluarga. Arah seperti ini selaras dengan perubahan hukum Pakistan setelah reformasi 2016 yang

dimaksudkan untuk menutup celah pengampunan keluarga dalam pembunuhan atas nama kehormatan (Talha et al., 2024), sehingga penempatan motif di sini terhubung dengan sikap negara terhadap perkara, bukan dengan pengurangan kesalahan pelaku.

Akan tetapi, kedudukan motif *honor* berubah ketika perkara sampai pada tingkat banding. *Lahore High Court* mengubah dasar tempat perkara itu berdiri. Fokusnya beralih dari struktur cerita yang tampak masuk akal menuju pertanyaan yang lebih keras tentang apakah pengakuan dapat dipertahankan dan apakah bukti yang tersisa cukup untuk menopang putusan bersalah. Pada tahap ini, motif *honor* kehilangan sebagian daya kerjanya karena tanpa pengakuan yang dianggap sah dan dapat diandalkan tidak ada bukti substansial yang cukup untuk memastikan bahwa pembunuhan benar-benar terbukti dilakukan atas nama kehormatan. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara alasan yang terasa terang secara sosial dan motif yang sungguh-sungguh diterima sebagai fakta hukum, sehingga perkara ini memperlihatkan bahwa kekuatan cerita di ruang publik tidak otomatis berubah menjadi kepastian di ruang pembuktian.

Yang dapat dikatakan secara lebih aman bukan bahwa pengadilan sepenuhnya mengadopsi narasi kehormatan dari ruang publik, dan bukan pula bahwa pengadilan sepenuhnya bebas dari narasi itu. Yang lebih tepat ialah bahwa perjalanan perkara ini menunjukkan lapisan yang bertumpuk. Pada tahap awal, bahasa kehormatan menyediakan kerangka yang langsung tersedia untuk merapikan peristiwa karena selaras dengan pengakuan awal pelaku, relasi keluarga, dan imajinasi sosial tentang rasa malu keluarga. Namun ketika perkara masuk ke tahap pembuktian, terutama di banding, kerangka tersebut tidak lagi cukup sehingga pengadilan menolak memperlakukan kekuatan cerita sosial sebagai pengganti bukti yang sah. Dengan demikian, motif *honor* tampak kuat pada tingkat pengaturan cerita, tetapi tidak selalu bertahan ketika pengadilan menguji dasar pembuktiannya.

Jejak bahasa kehormatan juga tetap penting sekalipun pada akhirnya pengadilan banding menolak dasar pembuktiannya. Dalam susunan perkara, korban tetap hadir sebagai figur yang sejak awal dibebani sorot moral, pelaku tetap hadir sebagai saudara laki-laki yang tindakannya dijelaskan melalui kosa kata kehormatan, dan keluarga tetap menjadi ruang utama tempat makna perkara disalurkan. Efek seperti ini tidak dapat diabaikan hanya karena pada tahap akhir pengadilan menilai bukti tidak cukup, sebab yang perlu dijaga ialah perbedaan antara apakah motif *honor* terbukti sebagai fakta hukum dan apakah bahasa kehormatan telah lebih dulu memengaruhi cara perkara dipahami. Dalam perkara Qandeel, jawaban atas dua pertanyaan itu tidak sama, sehingga penolakan pengadilan atas pembuktian motif tidak serta-merta menghapus pengaruh bahasa kehormatan pada susunan perkara.

Akibat hukumnya mulai tampak ketika pemingkalian fakta dipakai untuk menyiapkan penilaian atas pertanggungjawaban. Saat *honor* masuk sebagai alasan yang tampak menjelaskan pembunuhan, pengadilan harus menjaga perbedaan antara penjelasan sosial dan penilaian hukum. Penjelasan sosial dapat membantu menerangkan mengapa tindakan itu terjadi, tetapi penjelasan itu tidak boleh diam-diam membawa gagasan bahwa tindakan tersebut memiliki logika moral yang patut diperhitungkan di luar relevansi hukumnya (Cuppini, 2026). Dalam perkara Qandeel Baloch, risiko ini membesar karena korban sangat mudah diartikan melalui persona publiknya, sehingga apabila titik berat perkara bergeser ke sana, tindakan membunuh tidak lagi menjadi pusat perhatian yang tunggal. Yang kemudian muncul bukan lagi semata penilaian atas tindakan pelaku, melainkan juga penilaian atas cara korban hidup di ruang publik.

2. Atribusi motif *honor* dan pertanggungjawaban pidana

Motif *honor* dalam perkara Qandeel Baloch masuk ke pertanggungjawaban pidana melalui jalan yang tidak sederhana. Motif itu tidak berdiri sebagai unsur delik pembunuhan, sehingga ia tidak dapat

diperlakukan sebagai dasar yang dengan sendirinya melahirkan kesalahan pidana (Wajahat et al., 2023). Kedudukannya lebih sempit, tetapi tetap penting, karena motif dapat memberi arah pada cara pengadilan mengartikan kesengajaan, menempelkan kesalahan pada pelaku tertentu, dan menilai apakah negara masih perlu menjatuhkan pidana walaupun keluarga telah memberi pemaafan. Dalam hukum pidana Pakistan, perkara seperti ini tetap bergerak di bawah rezim *qatl-i-amd* dan konsekuensi penghukuman dalam *Pakistan Penal Code*, termasuk penggunaan Pasal 311 untuk memastikan bahwa pembunuhan yang dikaitkan dengan kehormatan tidak berhenti sebagai urusan privat keluarga (Child & Hunt, 2022). Karena itu, pembahasan tentang *honor* dalam perkara ini harus ditahan sejak awal agar tidak langsung berubah menjadi klaim bahwa motif tersebut menciptakan pertanggungjawaban pidana dengan sendirinya.

Pintu masuknya tetap berada pada pengakuan Muhammad Waseem. Ia mengaku membunuh Qandeel karena aktivitas publik korban dianggap memperlakukan keluarga. Pada taraf tertentu, alasan ini memberi arah yang jelas pada tindakan, sehingga pembunuhan tampak bukan sebagai ledakan sesaat tanpa sasaran, melainkan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan sumber rasa malu keluarga. Dalam arti itulah motif *honor* dapat membantu menjelaskan kesengajaan. Namun hubungan antara motif dan kesengajaan tidak boleh dibesarkan melampaui tempatnya. Motif hanya menjawab mengapa pelaku terdorong bertindak, sedangkan kesengajaan berhubungan dengan apa yang dikehendaki pelaku melalui tindakannya (Christine et al., 2025). Seseorang dapat mempunyai motif yang sangat kuat, tetapi hukum tetap harus menilai apakah ia benar-benar menghendaki kematian korban atau setidaknya bertindak dengan pengetahuan yang cukup dekat dengan akibat tersebut. Dengan demikian, motif *honor* tidak menggantikan pembuktian kesengajaan, tetapi kadang memberi jalan bagi pengadilan untuk mengartikan tindakan membunuh sebagai tindakan yang diarahkan secara sadar.

Dalam putusan tingkat pertama, keterhubungan itu tampak cukup jelas. Pengadilan menempatkan pengakuan, hubungan keluarga, dan rangkaian fakta kejadian sebagai dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dan kesalahan pelaku (Ghazi & Selamat, 2024). Dalam susunan ini, *honor* tidak dipakai sebagai pembenar, sebab kehormatan tidak ditaruh sebagai alasan yang meringankan atau menghapus kesalahan. Sebaliknya, motif tersebut justru memberi bentuk pada tindakan, sehingga pembunuhan lebih mudah diartikan sebagai tindakan yang disengaja dan cukup berat untuk tetap dihukum di bawah Pasal 311 *PPC* meskipun ada pemaafan keluarga. Di sinilah letak ironi yang penting. Dalam percakapan sosial, kehormatan kerap disajikan sebagai alasan yang “bisa dimengerti” karena berhubungan dengan rasa malu, reputasi, dan tekanan lingkungan. Akan tetapi, justru karena alasan itu memberi arah yang jelas pada tindakan, ia dapat memperkeras pembacaan bahwa pembunuhan dilakukan dengan tujuan tertentu. Pada titik ini, motif *honor* tidak mengurangi tanggung jawab, melainkan membantu memperjelas arah kesengajaan.

Masalahnya menjadi lebih rumit ketika pembahasan beralih dari kesengajaan ke pelekatan kesalahan pidana pada pelaku tertentu (Kadir, 2026a). Bahasa kehormatan hampir selalu berbicara dalam logika kolektif. Pelaku tidak hadir semata-mata sebagai individu yang mengambil keputusan sendiri, tetapi sebagai anggota keluarga yang mengaku bertindak demi martabat bersama. Bahasa seperti ini memang dapat membantu menjelaskan latar sosial tempat tindakan lahir. Namun pada saat yang sama, bahasa itu dapat mengaburkan pusat tanggung jawab jika diterima terlalu jauh di dalam penalaran pidana. Hukum pidana menuntut bahwa kesalahan tetap dilekatkan pada subjek yang melakukan pembunuhan, bukan pada keluarga sebagai satuan moral yang kabur. Karena itu, penjelasan tentang tekanan sosial dan tuntutan keluarga harus dipisahkan dari penilaian normatif atas kesalahan pelaku. Penjelasan sosial dapat menerangkan suasana tempat tindakan lahir, tetapi tidak dapat dengan sendirinya mengurangi kesalahan. Dalam perkara Qandeel, risiko pencampuran ini cukup besar karena alasan kehormatan sejak awal diajukan

dengan kosa kata nama baik keluarga. Bila bahasa seperti ini dibiarkan menguasai penjelasan, tindakan pelaku mudah tampak seolah-olah lahir dari kewajiban sosial, padahal secara hukum pembunuhan itu tetap merupakan keputusan individual yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku sendiri.

Pada titik itulah perubahan hukum Pakistan setelah 2016 menjadi sangat penting. Negara berupaya menutup ruang impunitas yang selama ini lahir dari pemaafan keluarga dengan memperkuat penggunaan Pasal 311 PPC dalam pembunuhan atas nama kehormatan. Arah kebijakannya cukup jelas. Pembunuhan yang dikaitkan dengan kehormatan tidak boleh direduksi menjadi urusan privat yang selesai begitu saja karena keluarga memaafkan pelaku (Ch & Jamal, 2023). Dalam kerangka ini, bahasa kehormatan tidak lagi semata-mata menjadi bahasa keluarga, sebab negara menariknya kembali ke dalam wilayah pelanggaran terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, yang ditekankan bukan lagi hak keluarga untuk menutup perkara, melainkan kepentingan negara untuk tetap menghukum pembunuhan yang mempunyai bobot sosial dan normatif tertentu (Jokhio et al., 2024). Dari sudut pertanggungjawaban pidana, keadaan ini memperjelas bahwa *honor* tidak seharusnya menyebarkan tanggung jawab ke tubuh keluarga sampai peran pelaku menjadi kabur (Elaiies & Rabe, 2025). Sebaliknya, motif tersebut, bila benar-benar terbukti, justru dapat menguatkan alasan negara untuk tetap menjatuhkan pidana.

Akan tetapi, perkara Qandeel Baloch juga memperlihatkan bahwa konstruksi normatif seperti itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan soal pertanggungjawaban pidana. Pada Februari 2022, *Lahore High Court*, Multan Bench, membatalkan putusan penjara seumur hidup dan membebaskan Waseem. Putusan ini memperlihatkan bahwa motif *honor* tidak pernah cukup berdiri sendiri. Pengadilan mempersoalkan pengakuan dan kemudian menilai bahwa struktur pembuktian yang tersisa tidak cukup kuat untuk menopang keyakinan bersalah, termasuk untuk memastikan bahwa pembunuhan benar-benar dilakukan atas nama kehormatan. Dengan demikian, hubungan antara motif dan pertanggungjawaban di dalam perkara ini selalu bergantung pada bukti yang menopangnya. Selama pengakuan masih dipandang dapat dipakai, motif *honor* mempunyai tempat dalam susunan perkara dan dapat memperkeras pembacaan atas kesengajaan serta alasan penghukuman. Namun setelah pengakuan itu goyah, jalur yang menghubungkan motif dengan pertanggungjawaban ikut goyah. Di sini tampak bahwa motif kehormatan bersifat derivatif. Nilainya bukan terletak pada kemampuannya berdiri sendiri, melainkan pada kemampuannya menempel pada bukti lain yang sah.

Perbedaan antara tingkat pertama dan tingkat banding dengan demikian tidak berhenti pada perubahan hasil, tetapi menyentuh inti pertanggungjawaban pidana. Pada tingkat pertama, *honor* berada dalam susunan perkara sebagai alasan yang menguatkan gambaran bahwa pelaku bertindak secara sadar dan bahwa negara tetap perlu menghukum walaupun ada pemaafan privat. Pada tingkat banding, susunan seperti itu dibongkar karena fondasi pembuktiannya dianggap tidak cukup. Artinya, *honor* dapat membantu membentuk cerita hukum pada satu tahap, tetapi tidak selalu bertahan ketika perkara sampai pada penilaian yang lebih keras tentang sah atau tidaknya bukti. Hal ini penting karena pembahasan tentang *honor killing* sangat mudah tergelincir ke anggapan bahwa begitu motif kehormatan diajukan, pertanggungjawaban pidana tinggal mengikuti. Perkara Qandeel justru membantah langkah itu. Ia memperlihatkan bahwa cerita yang sangat masuk akal secara sosial belum tentu cukup untuk membawa pengadilan pada putusan bersalah yang dapat dipertahankan (Chen, 2023).

Agar tidak kabur, pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana harus tetap memisahkan tiga tingkat. Tingkat pertama menyangkut apakah motif *honor* membantu pengadilan mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan. Tingkat kedua menyangkut apakah bahasa kehormatan mengaburkan atau justru memperjelas siapa yang harus memikul kesalahan pidana. Tingkat

ketiga menyangkut apakah negara masih mempunyai dasar untuk tetap menghukum ketika keluarga memaafkan pelaku. Dalam perkara Qandeel, tiga tingkat ini tidak selalu bergerak searah. Pada satu sisi, motif *honor* dapat membantu mengartikan tindakan sebagai pembunuhan yang diarahkan secara sadar. Pada sisi lain, bahasa kehormatan dapat membuat pelaku tampak sekadar menjalankan tekanan sosial. Sementara itu, pada tingkat penghukuman negara, hukum Pakistan justru berusaha mencegah agar perkara seperti ini tidak tenggelam di dalam pemaafan privat. Dengan demikian, *honor* tidak otomatis mengurangi pertanggungjawaban pidana, tetapi juga tidak secara mandiri menciptakan pertanggungjawaban itu. Yang tampak justru jalan penalaran yang lebih rumit, karena motif tersebut baru mempunyai arti hukum sejauh ia ditopang oleh pembuktian yang cukup dan diletakkan dalam struktur hukum yang tepat.

3. Narasi *honor*, pembuktian rasional, dan batas penalaran

Motif *honor* dalam perkara Qandeel Baloch tidak dapat dipakai untuk membuktikan segala hal. Motif itu tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pelakunya, dan juga tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana pembunuhan benar-benar telah dilakukan oleh orang yang dituduh. Dalam hukum pembuktian, kedudukannya jauh lebih terbatas. Motif hanya dapat membantu menerangkan mengapa suatu tindakan dilakukan, dan dalam keadaan tertentu dapat pula membantu pengadilan mengartikan arah kehendak pelaku sehingga pembunuhan tidak tampak sebagai tindakan yang muncul tanpa tujuan yang jelas (Leonetti, 2024). Di luar batas itu, nilai pembuktiannya harus dikendalikan dengan ketat, sebab perkara seperti Qandeel Baloch sangat mudah mendorong pengadilan atau pembaca perkara untuk memperlakukan cerita yang terasa sangat masuk akal secara sosial seolah-olah sudah cukup untuk menutup kekosongan bukti.

Pengakuan menjadi titik paling penting dalam persoalan ini. Pada tahap awal proses hukum, Waseem membuat pengakuan di hadapan hakim, kemudian pengakuan itu ditarik kembali. Selama pengakuan tersebut masih dianggap sah, perkara tampak mempunyai pusat pembuktian yang kuat sehingga motif *honor* dapat menempel pada pengakuan itu dan ikut memberi arah pada cara pembunuhan diartikan. Dalam keadaan seperti itu, *honor* bukan berdiri sebagai bukti yang mandiri, melainkan memperoleh daya karena ia ditopang oleh alat bukti lain yang untuk sementara dianggap dapat dipercaya. Hubungan seperti ini harus dijaga dengan jelas. Yang memberi dasar utama pada putusan bersalah bukan motifnya, melainkan pengakuannya, sedangkan motif kehormatan hanya memperoleh tempat karena ia melekat pada pengakuan tersebut. Begitu pengakuan itu goyah, tempat motif di dalam struktur pembuktian pun ikut goyah, sehingga perkara ini memperlihatkan bahwa kekuatan *honor* di ruang hukum bergantung pada kekuatan bukti yang lebih dasar.

Putusan banding menjelaskan hal itu dengan lebih terang. *Lahore High Court* mempersoalkan pengakuan dan menilai bahwa dasar pembuktian yang tersisa tidak cukup untuk mempertahankan putusan bersalah. Dalam penilaian ini, pengadilan tidak sedang menolak konteks sosial perkara, melainkan menolak untuk membiarkan konteks sosial menggantikan syarat pembuktian yang sah. Perbedaan ini sangat penting. Cerita tentang kehormatan keluarga mungkin terasa sangat meyakinkan di ruang publik, apalagi jika dikaitkan dengan posisi korban sebagai figur publik yang terus menjadi sasaran penilaian moral. Namun di dalam hukum acara pidana, rasa meyakinkan itu tidak dapat menggantikan alat bukti yang sah, tidak dapat menggantikan mutu pengakuan, dan tidak dapat menggantikan syarat kecukupan pembuktian. Karena itu, perkara Qandeel Baloch justru memperlihatkan garis batas yang tegas antara cerita yang mudah diterima secara sosial dan fakta hukum yang benar-benar dapat dipertahankan di hadapan standar pembuktian pidana.

Di sinilah persoalan penguat bukti menjadi sangat vital, karena jika pengakuan tidak lagi dapat diandalkan, pengadilan harus bertanya apa yang masih tersisa. Pertanyaan ini bukan soal teori belaka, melainkan inti dari penilaian pembuktian. Dalam perkara Qandeel, narasi *honor* dapat membuat hubungan antara korban, keluarga, dan tindakan pelaku tampak sangat koheren, sehingga seluruh peristiwa seolah-olah tersusun rapi dalam satu alur yang mudah dimengerti. Akan tetapi, koherensi cerita tidak sama dengan kekuatan pembuktian. Cerita yang rapi tetap dapat gagal sebagai dasar putusan bersalah jika ia tidak didukung oleh fakta-fakta lain yang berdiri sendiri dan saling menguatkan secara sah. Masalah terbesar dalam perkara ini terletak di sana. Motif yang sangat meyakinkan secara sosial berisiko diberi bobot pembuktian yang lebih besar daripada yang sebenarnya dapat ditanggungnya, padahal hukum pidana tidak bekerja dengan ukuran “masuk akal menurut perasaan umum”, melainkan dengan ukuran apakah alat buktinya cukup, sah, dan mampu menopang keyakinan hakim secara dapat dipertanggungjawabkan (Dahlman, 2024).

Ukuran pembuktian rasional juga menjadi penting justru pada saat narasi perkara tampak sangat kuat. Dalam perkara ini, pembuktian rasional menuntut pembedaan yang keras antara fakta yang terbukti dan penjelasan sosial yang tampak cocok dengan peristiwa. Motif *honor* dapat membantu menjelaskan suasana perkara, tetapi ia tidak dapat dibiarkan menutup lubang yang ditinggalkan oleh lemahnya bukti lain. Di sinilah pengadilan banding mengambil posisi yang penting. Pengadilan banding tidak sedang menyangkal bahwa perkara ini sejak awal dibicarakan dalam bahasa kehormatan. Yang ditolak adalah langkah yang memperlakukan bahasa itu sebagai pengganti pembuktian. Dengan cara seperti ini, *Lahore High Court* mengingatkan bahwa pembuktian pidana tidak dapat bertumpu pada kekuatan cerita semata, karena begitu pengadilan mulai menerima cerita yang kuat sebagai pengganti bukti yang cukup, garis pemisah antara penalaran hukum dan penghakiman moral akan menjadi kabur (Novaković, 2026).

Risiko itu membesar ketika persona publik korban diberi ruang yang terlalu lebar di dalam cara perkara dijelaskan. Qandeel Baloch adalah figur yang sejak hidupnya terus diperdebatkan dalam ukuran kepantasan, seksualitas, dan reputasi. Keadaan ini memang relevan untuk menjelaskan mengapa alasan kehormatan muncul dari pihak pelaku atau keluarga. Namun relevansi itu tidak dapat bergerak terlalu jauh. Begitu citra publik korban ikut membentuk keyakinan tentang siapa yang bersalah atau mengapa pembunuhan terasa dapat dimengerti, pengadilan berada sangat dekat dengan penalaran yang membawa prasangka. Dari sudut hukum pembuktian, keadaan itu berbahaya karena perhatian perkara pelan-pelan berpindah dari tindakan pelaku dan alat bukti yang sah ke citra sosial korban. Pergeseran seperti ini tidak selalu tampak secara terang, dan justru karena sering hadir secara halus, ia perlu dikendalikan lebih ketat. Pembuktian pidana tidak boleh bergantung pada apakah korban mudah disukai atau mudah dihakimi, sebab yang harus dibuktikan tetap perbuatan pelaku dan dasar hukum yang menopang putusan terhadapnya (Berge & Sunde, 2026).

Perkara Qandeel Baloch juga menunjukkan bahwa batas penalaran pidana yang sah tidak terletak pada penolakan terhadap konteks sosial, melainkan pada disiplin dalam menempatkan konteks itu. Konteks tetap penting karena tanpa konteks, alasan mengapa kata *honor* muncul di dalam perkara tidak akan pernah dapat dijelaskan secara utuh. Akan tetapi, konteks hanya berfungsi sebagai latar yang membantu menerangkan suasana perkara. Ia tidak boleh berubah menjadi dasar yang mengisi sendiri syarat pembuktian. Karena itu, batas yang perlu dijaga bukan batas antara hukum dan masyarakat, melainkan batas antara penjelasan sosial dan kesimpulan pembuktian. Selama batas ini masih dipertahankan, pengadilan masih dapat membaca kekerasan berbasis kehormatan secara serius tanpa jatuh ke dalam penalaran yang membiarkan cerita sosial mengambil alih fungsi alat bukti.

KESIMPULAN

Perkara Qandeel Baloch memperlihatkan bahwa *honor* masuk ke ruang hukum pidana bukan sebagai fakta budaya yang telah selesai, melainkan sebagai motif yang mula-mula diajukan oleh pelaku, kemudian diberi tempat di dalam konstruksi perkara, lalu diuji kembali ketika pengadilan menilai apakah motif itu benar-benar mempunyai dasar pembuktian yang cukup. Pada tahap awal, kehormatan keluarga cepat menjadi bahasa utama yang dipakai untuk menjelaskan pembunuhan, sehingga peristiwa ini sejak dini tidak lagi dipahami sebagai pembunuhan biasa. Akan tetapi, perjalanan perkara memperlihatkan bahwa alasan yang terasa sangat kuat di ruang sosial tidak otomatis berubah menjadi fakta hukum yang mapan. Putusan tingkat pertama masih memberi tempat pada susunan perkara yang mengaitkan pembunuhan dengan kehormatan keluarga, sedangkan putusan banding justru memutus susunan itu ketika pengakuan dipersoalkan dan bukti yang tersisa tidak dianggap cukup. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bahwa motif *honor* mempunyai arti hukum hanya sejauh ia dapat bertahan di dalam struktur pembuktian yang sah.

Hubungan antara motif *honor*, pertanggungjawaban pidana, dan pembuktian dalam perkara ini juga tidak bergerak secara lurus. Motif tersebut dapat membantu mengartikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena ia memberi arah yang cukup jelas pada tindakan pelaku, tetapi pada saat yang sama bahasa kehormatan juga dapat mengaburkan pusat kesalahan apabila tindakan membunuh terlalu jauh dijelaskan sebagai hasil tekanan keluarga atau rasa malu komunal. Di sisi lain, hukum Pakistan setelah reformasi 2016 memperlihatkan keinginan negara untuk mencegah agar perkara ini tidak berhenti pada pemaafan keluarga, meskipun penguatan sikap negara pada tingkat penghukuman tetap tidak dapat menggantikan tuntutan pembuktian yang rasional. Perkara Qandeel Baloch karena itu menegaskan bahwa masalah utama dalam pembunuhan atas nama kehormatan bukan hanya terletak pada munculnya narasi kehormatan, melainkan pada kecenderungan memberi daya pembuktian yang terlalu besar pada motif yang sangat meyakinkan secara sosial, sehingga batas antara cerita yang terasa masuk akal dan bukti yang sungguh-sungguh cukup harus tetap dijaga dengan ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Awais, M., & Al Gharaibeh, F. (2026). Justice or tradition? Cross-national media framing of honor killings in India, Pakistan, and global outlets. *Women's Studies International Forum*, 114, 103219. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103219>
- Berge, A. W., & Sunde, N. (2026). Competing narratives: A comparative case study of prosecutors' and defence lawyers' interpretations of digital evidence. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127261441444>
- Ch, S. N., & Jamal, S. (2023). Unabated Serge of Honor Killing: Legal Perspective of Superior Courts in Pakistan. *Annals of Human and Social Sciences*, 4(IV). [https://doi.org/10.35484/ahss.2023\(4-IV\)61](https://doi.org/10.35484/ahss.2023(4-IV)61)
- Chen, B. (2023). Prosecutorial Storytelling through Intrinsic Evidence. *Pepperdine Law Review*, 115–145.
- Child, J. J., & Hunt, A. (2022). Beyond the Present-Fault Paradigm: Expanding Mens Rea Definition in the General Part. *Oxford Journal of Legal Studies*, 42(2), 438–467.

- Christine, Kristiawanto, & Teepapal, T. (2025). Uncovering intent: Reassessing the role of motive in the punishment of premeditated murder in Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 3(1).
- Cuppini, A. (2026). Whose Stories Count? *Journal of International Criminal Justice*.
<https://doi.org/10.1093/jicj/mqag014>
- Dagan, N., & Zimran, A. (2023). Punishment as text. *Punishment & Society*, 25(5), 1293–1311.
<https://doi.org/10.1177/14624745231165380>
- Dahlman, C. (2024). A systematic account of probabilistic fallacies in legal fact-finding. *The International Journal of Evidence & Proof*, 28(1), 45–64. <https://doi.org/10.1177/13657127231209019>
- Elaies, N., & Rabe, T. N. (2025). Understanding “Honor-Based Violence” In Scandinavia: A Qualitative Meta-Synthesis of Honor-Based Violence Conceptualizations in Research Studies. *Deviant Behavior*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2565443>
- Ge, E., DongZhi, C., & Mace, R. (2024). Religiosity and Gender Bias Structure Social Networks. *Evolutionary Human Sciences*, 6(23), 1–20.
- Ghazi, A., & Farooq Salamat, U. (2024). HONOUR KILLING AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN PAKISTAN. *Review of Human Rights*, 9(1), 118–142. <https://doi.org/10.35994/rhr.v9i1.256>
- Heydari, A., Teymoori, A., & Trappes, R. (2021). Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence Common Discourses, and a Critical View. *Social Sciences Information*, 60(1), 86–106.
<https://doi.org/10.1177/0539018421994777>
- Jokhio, M. A., Almani, A., & Asif, S. (2024). Effectiveness of Legal Framework for Honour Killings in Sindh: The Impact of Sociocultural Influences. *Journal of Development and Social Sciences*, 5(2), 174–184.
- Kadir, Z. K. (2026a). Mapping Recorded Homicide in Indonesia: An Ecological Criminological Analysis Using BPS Data. *Punggawa Law Review*, 1(2), 9–18.
- Kadir, Z. K. (2026b). Narrative Closure in Honor killing Cases: How Judgments Stabilise Meaning, Eliminate Ambiguity, and Produce Sentencing Certainty. *Punggawa Law Review*, 1(1), 1–10.
- Kadir, Z. K. (2026c). PENGGUNAAN CULTURAL DEFENSE DALAM HUKUM PIDANA: BATAS DOKTRINAL PADA PERKARA HONOR KILLING. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), 1–18.
- Khoja-Moolji, S. (2022). Patriarchy as an Assemblage: Qandeel Baloch, Male Domination and Feminist Publics in Pakistan. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 45(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/00856401.2021.1969138>
- Leonetti, C. (2024). Ensuring the reliability of evidence in the New Zealand criminal courts: The admissibility of forensic science. *Common Law World Review*, 53(4), 197–222.
<https://doi.org/10.1177/14737795241237799>
- Manzoor, S., Mumtaz, M. M., Batool, S., & Khan, T. (2025). Unfolding the Truth: A Chronological Analysis of the Qandeel Baloch Murder Case in the Context of Honour, Gender, and Criminal Liability in Pakistan. *Journal of Political Stability Archive*, 3(2), 1386–1408.
<https://doi.org/10.63468/jpsa.3.2.77>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri’: A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Munro, V. E., Bettinson, V., & Burton, M. (2021). The narrative structure of criminal law judgments. *International Journal of Law in Context*, 17(2), 172–189.

- Novaković, F. (2026). Proving guilt beyond reasonable doubt: Evidentiary standards in criminal proceedings in Bosnia and Herzegovina. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127261436186>
- Palermo, M. T. (2022). Scientism, Ethics and Evil: From Mens Rea to Cerebrum Reus. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(9), 1036–1048.
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and ‘Reality’: A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Ram, P. (2025). Between Faith, Family, and Fear: An Ethnographic Study of Honour-Related Violence in Muslim Communities in Western Uttar Pradesh. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*1, 13(6), 337–344.
- Shahid, A., Awan, M. H., & Rana, F. A. (2024). Honour Killings in Pakistan: Legal Perspectives and Reforms. *Qlantic Journal of Social Sciences*, 5(1), 134–140. <https://doi.org/10.55737/qjss.547319279>
- Talha, A., Noor, S., Mingfei, M., & Sardar, T. (2024). Judicial Inefficacies and Legal Inconsistencies in Addressing Honour Killings: A Human Rights Analysis of Pakistan’s Legal Framework. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 2931–2941. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i4.2438>
- Villacampa, C., Salat, M., & Torres, C. (2026). Understanding Legal Attitudes Towards Honour-Based Violence: Evidence From a Survey of Young Adults in South-Western Europe. *European Journal on Criminal Policy and Research*. <https://doi.org/10.1007/s10610-026-09669-w>
- Wajahat, J., Shahjehan, H., & Ali, R. N. (2023). An Analysis of Qisas and Diyat Laws, Inadequately Encompassed the Islamic Gist as Fused in Judicial System of Pakistan. *Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 532–537. <https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.287>
- Williams, S. R., Afrouz, R., & Vassos, S. (2023). Exploring Rural and Regional Social Workers’ Perceptions and Practices of Technology-Facilitated Domestic Abuse. *Australian Social Work*, 76(2), 231–244. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2021.1985547>